

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di entitas pemerintah dan organisasi publik. Transparansi Keuangan Akuntansi sektor publik memungkinkan pemerintah dan lembaga publik untuk menyajikan informasi keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memberikan kepercayaan kepada publik bahwa dana yang dikelola pemerintah digunakan dengan benar dan sesuai peruntukannya.

Akuntabilitas Publik Dengan adanya laporan keuangan yang disusun sesuai standar, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, legislatif, dan auditor eksternal. Hal ini mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Pengambilan Keputusan yang Tepat Informasi keuangan yang akurat dan relevan membantu pembuat kebijakan dalam merancang program, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi kinerja kegiatan pemerintah. Akuntansi sektor publik menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Efisiensi dan Pengawasan Pengeluaran Akuntansi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan efisiensi dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran juga dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Pematuhan terhadap Regulasi Akuntansi sektor publik membantu pemerintah dalam mematuhi peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan persyaratan pelaporan lainnya. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Meningkatkan Kepercayaan Publik Laporan keuangan yang transparan dan akurat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Masyarakat lebih yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Perencanaan Jangka Panjang Akuntansi sektor publik memberikan panduan bagi pemerintah untuk merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan publik. Perencanaan yang baik memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih merata.

Kolaborasi dan Pengawasan Antarinstansi Melalui akuntansi sektor publik, lembaga-lembaga pemerintah dapat bekerja sama dengan lebih baik dan saling mengawasi. Ini mendorong koordinasi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran negara. Mendukung Pelaporan Berbasis Akrua Standar akuntansi berbasis akrual, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan beban yang harus ditanggung. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai sistem informasi telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

SIMDA merupakan perangkat lunak yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, aset, dan pelaporan keuangan. Sistem ini memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. SIMDA hadir untuk membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memenuhi ketentuan tersebut dengan mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ole (2014) menunjukkan bahwa implementasi SIMDA di Kabupaten Minahasa Tenggara telah meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi dan akurasi penyusunan laporan keuangan. Penelitian lain oleh Danianti (2020) di Kabupaten Bintan mengungkapkan bahwa SIMDA mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi masih menjadi hambatan utama.

Berdasarkan teori DeLone dan McLean (1992) tentang kesuksesan sistem informasi, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna merupakan elemen kunci dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. Kerangka teori ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas SIMDA di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Selain itu, kerangka teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis (1989) juga relevan dalam penelitian ini. Model ini menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan memengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2023, masih ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Implementasi SIMDA di TTS menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan fitur-fiturnya yang canggih, SIMDA dapat membantu PPKAD TTS dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD. Namun, keberhasilan implementasi SIMDA sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kompetensi pengguna, dukungan manajemen, dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Penelitian oleh Wibowo.(2020) menunjukkan bahwa

pelatihan dan pendampingan yang intensif dapat meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi sistem ini.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi SIMDA mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan di TTS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi SIMDA. Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMDA. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik tentang implementasi sistem informasi di sektor publik.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Prasetyo dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kompetensi pengguna menjadi kendala utama dalam implementasi SIMDA di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks TTS, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi SIMDA. Data akan dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SIMDA di TTS. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang ingin mengimplementasikan SIMDA. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas SIMDA dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis dan akademis yang tinggi. Untuk mendukung validitas dan reliabilitas hasil penelitian, berbagai referensi dan studi terdahulu akan digunakan sebagai dasar teori dan kerangka analisis. penelitian ini akan melibatkan partisipasi semua pegawai pengguna SIMDA.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup semua pengguna SIMDA di bawah naungan SEKDA TTS. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang

sebenarnya di lapangan dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di TTS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi implementasi sistem informasi di sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

1.3 Persoalan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

Bagaimana implementasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten TTS?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menggambarkan proses implementasi SIMDA di pemerintah daerah.
- b. Memahami persepsi pengguna terhadap efektivitas SIMDA.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi Praktis, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten TTS untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMDA.
- b. Bagi Akademisi, agar menambah pengetahuan, dan wawasan peneliti mengenai ilmu manajemen keuangan dan sistem informasi di sektor publik dan juga salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 jurusan akuntansi di Universitas Kristen Artha Wacana.